

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bersamaan dengan kemajuan perekonomian semakin mengalami pertumbuhan. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila meningkatnya jumlah produk atau jasa dari tahun ketahun. Negara Indonesia sendiri adalah pemeritahan daerah yang mengikuti sistem pemerintahan daerah sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi daerah adalah kekuasaan yang diberikan pemerintah dalam pengaturan dan pengelolaan wilayahnya guna keperluan daerah atau penduduk tersebut dari bidang ekonomi, politik, sosial, budaya serta adat istiadat yang sesuai dengan lingkungan daerah setempat.² Adanya otonomi daerah tersebut pemerintah desa dapat mengatur tata kelola pemerintahan sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam upaya menggali sumber pendapatan.³ Otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat pembaharuan desa sehingga ketimpangan perkembangan antar desa secara lama-kelamaan berkurang. Penghasilan desa bersumber dari penghasilan asli desa yang terdiri dari pajak desa, perolehan pungutan desa, perolehan dari badan usaha milik desa dan perolehan dari pengelolaan kekayaan desa lainnya yang disisihkan.

² Johan Jasin, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 118

³ Carunia Mulya Firdaus, *Kebijakan Dan Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal. 9

Suatu negara dikatakan makmur apabila pembangunan berjalan dengan baik dan lancar, tidak hanya pembangunan di perkotaan tetapi juga pembangunan ekonomi sebaiknya dilaksanakan di wilayah pedesaan. Dimana perkembangan ekonomi suatu wilayah dicerminkan melewati tahap kesejahteraan masyarakat yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu wilayah terutama di desa.⁴ Perkembangan ekonomi desa seringkali lambat dalam pembangunan dibanding dengan pembangunan ekonomi perkotaan yang dinilai cepat karena masyarakat kota lebih modern dan bisa menerima perubahan. Pembangunan ekonomi nasional harus dimulai dari desa hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah ketimpangan antara pedesaan dan perkotaan.

Pembangunan ekonomi desa adalah suatu proses memperbaiki kehidupan masyarakat pada suatu wilayah atau daerah baik kondisi ekonomi maupun sosial agar pemerataan pembangunan timbul disuatu wilayah sehingga tidak ada lagi ketidakseimbangan antara desa yang maju dan desa yang tertinggal.⁵ Dimana tolak ukur pembangunan desa dilihat dari ketersediaan fasilitas umum yang memadai, infrastruktur desa yang baik, air bersih, kemudahan dalam mengakses berita, keterampilan sumber daya manusia dan tingkat penghasilan penduduk.⁶

⁴ Arif Eko Wahyudi Arifanto Dan Ahmad Riyadh U. Balahmar, "Pemberdayaan Dalam Pembangunan Ekonomi Desa", *Jurnal JKMP*, Vol. 2, No. 1, Maret 2014, hal. 57

⁵ Umar Nain, *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*, (Makassar: Garis Khatulistiwa, 2019), hal. 30

⁶ Sonny Harry B. Harmadi, Udin Suchaini, Ardi Adji, *Indikator Pembangunan Desa Di Indonesia: Di Tinjau Dari Ketidak sesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan Desa, Diakses dari <http://sonyharmadi.com/2020/07/14/indikator-pembangunan-desadi-indonesia-dari-ketidaksesuaian-indikator-pengukuran-pembangunan-desadi/>*, pada 5 Juni 2021

Pembangunan ekonomi desa harus bertujuan untuk menciptakan wilayah pedesaan yang lebih maju. Agar pembangunan ekonomi desa terwujud maka perlu adanya prinsip yang harus dijalankan antara lain: Transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan ekonomi desa yang harus diketahui oleh masyarakat agar mengerti suatu program yang dijalankan oleh pemerintah desa, adanya partisipasi oleh seluruh elemen penduduk desa untuk melaksanakan rencana pembangunan ekonomi desa supaya tujuan yang ditentukan tercapai, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) semua proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dijalankan tidak menyimpang dari program pembangunan, pembangunan ekonomi harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa, dan program-program yang dijalankan harus dapat berjalan secara terus menerus dan berkelanjutan.⁷

Adanya pembangunan ekonomi desa pemerintah telah memberikan dukungan dana dan kewajiban melakukan pembangunan kepada kepala desa menggunakan Undang-Undang tentang Desa No. 06 Tahun 2014.⁸ Salah satu penataan desa dilakukan bertujuan guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta menanggulangi kesenjangan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah suatu proses kegiatan dalam rangka perubahan menuju arah yang makin baik.⁹ Adanya program yang digunakan untuk pengembangan ekonomi di pedesaan ialah kewirausahaan sosial hal ini

⁷ Abdul Rahman Suleman, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Meda: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 10-11

⁸ Peraturan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 mengenai Desa

⁹ Heliarta, *Pembangunan Nasional*, (Semarang: Alpirin, 2019), hal. 2

dilakukan guna memecahkan persoalan sosial yang meliputi masalah kemiskinan, kerusakan lingkungan, pengingkaran hak sosial, korupsi, pengangguran, dll, agar terbangun aktivitas sosial yang baik untuk semua warga masyarakat. Kewirausahaan sosial adalah sebuah aktivitas yang bernilai sosial dan inovatif sebagai salah satu penyelesaian yang dapat diterapkan guna menyalurkan bantuan yang berkelanjutan yang dapat memberdayakan masyarakat miskin sehingga dapat terbebas dari kemiskinan.¹⁰ Berdasarkan keterangan teori dari Santosa peran kewirausahaan sosial merupakan “dapat membantu peluang kerja, melaksanakan pembaharuan dan desain baru mengenai pembuatan barang ataupun jasa guna memenuhi keinginan masyarakat, menjadi dana kemasyarakatan, dan penambahan persamaan”.¹¹ Adanya Kewirausahaan sosial ini diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan dan membuat para masyarakat lebih produktif serta mempunyai pengharapan yang makin bermanfaat tentang masa depannya.¹²

Untuk membantu peningkatan perekonomian desa dan menjalankan misi dari kewirausahaan sosial yang mana pada suatu desa terdapat lembaga yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan lembaga penyedia layanan sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian, menggerakkan perekonomian dalam sektor ekonomi usaha,

¹⁰ Nur Firdaus, “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.22, No. 1, 2014, hal. 59

¹¹ A. Tenrinippi, “Kewirausahaan Sosial Di Indonesia”, *Meraja Journal*, Vol. 2, No. 3, November 2019, hal. 27

¹² Siswahyudianto dan Dedi Suselo, “Strategi Pemberdayaan Dan Inovasi Produk Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Tulungagung”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 02, April 2019, hal. 89

dan mengelola potensi desa sehingga nantinya dapat memberikan pendapatan bagi desa.¹³ Pengaturan BUMDes mengenai pendirian, pengembangan, dan Pengelolaan BUMDes mulai dilakukan paska adanya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa sebagai usaha peningkatan penghasilan penduduk melalui penggalan sumber potensi desa yang disusun oleh masyarakat secara langsung.¹⁴ Dalam pendirian BUMDes perlu adanya aspek yang perlu dipertimbangkan hal tersebut meliputi adanya ide-ide pengelola suatu desa dan masyarakat desa, adanya kemampuan usaha ekonomi desa, ada sumber daya alam yang dapat dikelola dengan baik dan menguntungkan, adanya pelaksana yaitu sumber daya manusia, dan adanya pelibatan aset dari pemerintah desa berupa modal melalui pembiayaan yang dikelola sebagai unsur dari usaha BUMDes.

Dalam fondasi aktivitas ekonomi Badan Usaha Milik Desa berperan menjadi badan lembaga sosial dan komersial. BUMDes berfungsi sebagai badan lembaga sosial yang menyediakan layanan sosial kepada masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga komersil bertujuan untuk menggali manfaat dalam upaya peningkatan perekonomian desa.¹⁵ BUMDes pada kepemilikan kapital dan pelaksanaannya dikelola pengelola desa dan rakyat. Permodalan BUMDes bermula dari anggaran dana desa. Dalam pasal 132 PP Desa,

¹³ Ridha Rizki Novando, dkk. *Jejak Sukses Desa Membangun BUMDes: Belajar Dari BUMDes Mart Sumber Rejo*, (Jakarta: Pusdatin Balilafto Kementerian desa, 2019), hal. 2

¹⁴ Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemneterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Pendoman Teknis (Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMDesa Bersama)*, (t. t. p.: t. p., 2017), hal. 2

¹⁵ Agus Suman, dkk, *Ekonomi Lokal: Pemberdayaan Dan Kolaborasi*, (Malang: UB Press, 2019), hal. 32

pembentukan BUMDes dilakukan dengan musyawarah desa dan ditetapkan sesuai dengan aturan desa yang mana pembentukan BUMDes harus memiliki karakteristik yang meliputi adanya kekayaan yang terpisah, mempunyai maksud dan keperluan sesuai dengan undang-undang yakni guna meningkatkan pendapatan desa dan mengembangkan perekonomian desa, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang terpadu hal ini dilihat melalui adanya penasehat dan pelaksana operasional.

BUMDes merupakan badan bisnis yang didirikan berdasarkan komitmen untuk berkerja sama dengan penduduk, bergotong royong, dan menggalang kemampuan ekonomi masyarakat guna membangun ketentraman dan kenyamanan warga desa.¹⁶ Pengembangan BUMDes sangat diperlukan agar unit usaha yang dikelola BUMDes tetap berjalan. Pembangunan BUMDes ialah format penegakan tentang badan-badan ekonomi desa dan serta alat pemanfaatan ekonomi lokal menggunakan sekian banyak macam potensi yang terdapat di desa.¹⁷ Tujuan berdirinya Badan Usaha Milik Desa yaitu untuk menambah kekayaan desa, untuk menggali potensi desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, membuka lapangan pekerjaan serta untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat desa.¹⁸

¹⁶ David Prasetyo, *Peran BUMDes Dalam Membangun Desa*, (Kalimantan Barat: CV Derwati Press, 2019), hal. 12

¹⁷ Ridha Rizki Novando, dkk., *Jejak Sukses Desa Membangun BUMDes: Belajar Dari BUMDes Mart Sumber Rejo,....*, hal. 89

¹⁸ Abdul Rahman Suleman, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa....*, hal. 38

Pengelolaan BUMDes tidak hanya melibatkan masyarakat desa saja tapi juga ada keterlibatan pihak ketiga.¹⁹ BUMDes diharapkan dapat menjadikan desa semakin mandiri dan sejahtera serta mampu memberikan layanan kepada anggota lain diluar masyarakat desa dengan cara membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui unit-unit usaha yang didirikan. Berbagai macam usaha yang dikelola oleh BUMDes ditata dalam peraturan menteri yang mencakup pelayanan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok, perdagangan produk pertanian, perusahaan kecil beserta rumah tangga yang mampu dikembangkan sesuai dengan kemampuan daerah. Dengan adanya jenis usaha yang dibuat oleh BUMDes diharapkan mampu membantu perkembangan usaha, pembaharuan ekonomi desa, pemberdayaan warga desa, dan memberi kontribusi kepada warga bagi yang membutuhkan.²⁰

Agar unit usaha yang dikelola BUMDes tetap berjalan maka perlu adanya pengembangan usaha pada setiap unit usaha. Pengembangan usaha adalah suatu proses untuk memperbaiki strategi usaha guna mencapai tujuan yang diinginkan.²¹ Dimana dalam menjalankan kegiatan usaha faktor-faktor produksi mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan usaha. komponen produksi tersebut mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia,

¹⁹ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal. 27

²⁰ Maryunani dan Axellina Maura Setyanti, *Ekonomi Perdesaan*, (Malang: UB Press, 2020), hal. 98

²¹ Retno Murti Setyorini, *Buku Saku Prakarja*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 66

modal, dan teknologi. BUMDes perlu pengembangan strategi daya saing guna mencapai masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera²².

Kabupaten Tulungagung ialah suatu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan daerah Kabupaten Kediri sebelah utara, Kabupaten Blitar sebelah timur, Samudra Indonesia sebelah selatan, dan Kabupaten Trenggaleh serta Kabupaten Ponorogo sebelah barat. Di kecamatan Karangrejo terdiri dari 13 desa salah satunya Desa Sukorejo adalah desa yang berada di lereng gunung wilis bagian timur dan berada di barat laut kabupaten Tulungagung yang berjarak 15 Km dari kota. Desa Sukorejo terletak pada koordinat 111-112 bujur timur dan 7,5-8 lintang selatan berada diketinggian 90 meter dari permukaan air laut. Desa Sukorejo mempunyai luas wilayah 166.645 hektar, dengan jumlah penduduk 2.841 orang, terbagi 1.525 laki-laki dan 1.311 perempuan.²³

Di desa Sukorejo, masyarakat yang berlokasi tinggal di wilayah tersebut beberapa berkerja sebagai buruh tani, karyawan pabrik dan ibu rumah tangga. Dengan adanya urusan itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016 Desa Sukorejo mendirikan suatu lembaga ekonomi yang diberi nama BUMDes Sukoraharjo yang memiliki 4 unit usaha salah satunya usaha kerajinan tas anyaman yang sedang berkembang. Pengembangan usaha sangat diperlukan agar usaha terus berkembang. Serta perlu adanya strategi pemasaran yang

²² Dien Noviany Rahmatika, dkk., "Strategi Pengembangan Kualitas BUMDes Pendekatan Model Tetrapreuner Serta Kemitraan Dengan Perguruan Tinggi dan Perbankan", *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, vol. 2, No. 2, 2019, hal. 86

²³ Dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Kecamatan Karangrejo Dalam Angka 2019*

luas karena untuk saat ini pemasarannya masih dari mulut ke mulut. Adanya BUMDes Sukoraharjo ini diharapkan mampu mendukung dan memajukan bidang usaha ekonomi masyarakat. Pengembangan usaha dan perekonomian masyarakat desa sangat perlu diperhatikan, apabila dioptimalkan dengan baik akan memberikan dampak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Usaha kerajinan tas anyaman ini didirikan pada tahun 2016. Usaha kerajinan tas anyaman sudah menjalankan proses pemasaran melalui jual beli yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen. Namun kadang-kadang proses pemasaran masih dilakukan dengan cara pemasaran langsung atau dari mulut ke mulut, sehingga para penjual yang memasarkan barang atau jasa secara langsung akan kalah bersaing, karena pengembangan usaha ditentukan dengan kemampuan membangun manajemen strategi. Manajemen strategi ialah suatu aktivitas dalam pemungutan hasil yang mendasar dan mendalam beserta teknik pengaplikasian yang diciptakan oleh manajer serta dilakukan oleh semua pihak yang terlibat didalam suatu perusahaan untuk menjangkau sasaran yang telah ditetapkan.²⁴ Adanya kerajinan tas anyaman ini membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk belajar kerajinan menganyam tas dan mengasah keterampilan yang dimiliki sehingga para warga lebih produktif.

Dalam menghadapi persaingan bisnis dunia usaha maka diperlukan strategi usaha yang tepat guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pemasaran produk seseorang harus pandai membaca peluang yang ada.

²⁴ Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Publik), hal.23

Seorang pengusaha harus mampu menciptakan produk yang inovasi dan ide-ide yang brilian. Inovasi tidak hanya menciptakan produk baru tapi memodifikasi produk–produk yang sudah ada.²⁵ Produk yang diproduksi agar terus berkembang perlu adanya upaya memasarkan produk ke pasar yang lebih luas. Lingkup pemasaran dan penjualan yang sangat kecil akan mempengaruhi pengembangan usaha.

Berdasarkan fakta yang terjadi dari berbagai uraian diatas dengan semakin ketatnya persaingan dunia usaha tentunya pengembangan usaha sangat diperlukan, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa Sukoraharjo Dalam Pengembangan Usaha Kerajinan Tas Anyaman Desa Sukorejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, dan untuk memberi batas ruang lingkup pengkajian maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BUMDes Sukoraharjo dalam pengembangan usaha kerajinan tas anyaman?
2. Bagaimana pendampingan BUMDes Sukoraharjo terhadap strategi pemasaran usaha kerajinan tas anyaman?
3. Bagaimana kontribusi BUMDes Sukoraharjo bagi perekonomian masyarakat melalui kerajinan tas anyaman?

²⁵ Daryanto, *Pendidikan Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hal. 16

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah diatas tentunya tidak lepas dari ketertarikan peneliti untuk mendalami lebih jauh, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran BUMDes Sukoraharjo dalam pengembangan usaha kerajinan tas anyaman.
2. Untuk menganalisis pendampingan BUMDes Sukoraharjo terhadap strategi pemasaran usaha kerajinan tas anyaman.
3. Untuk menganalisis kontribusi BUMDes Sukoraharjo bagi perekonomian masyarakat melalui kerajinan tas anyaman.

D. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ditujukan untuk membatasi masalah agar penelitian lebih fokus serta tidak melenceng dari pokok permasalahan, maka peneliti membatasi persoalan penelitian tentang peran Badan Usaha Milik Desa Sukoraharjo dalam pengembangan usaha kerajinan tas anyaman, pendampingan BUMDes Sukoraharjo dan kontribusi BUMDes bagi perekonomian melalui kerajinan tas anyaman.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkaitan. Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat yang didapat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan dedikasi dalam dunia akademik, perkembangan ilmu pengetahuan, dan memberikan pemahaman mengenai Peran BUMDes Sukoraharjo dalam pengembangan usaha kerajinan tas anyaman.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat mempraktekkan teori-teori yang didapat selama di perkuliahan serta menambah wawasan tentang peran BUMDes dalam pengembangan kerajinan tas anyaman.

b. Bagi Akademis

Semoga penelitian ini dapat menambah daftar keilmuan bagi perpustakaan serta dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi untuk strategi pengembangan usaha yang merujuk pada hasil penelitian-penelitian di lapangan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat dimasa mendatang untuk bahan referensi yang nantinya memberikan pertimbangan dan sebagai bahan rujukan.

d. Bagi BUMDes Sukoraharjo

Sebagai sumber wawasan keilmuan yang mampu memberikan masukan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi BUMDes dalam mengetahui lebih jauh perihal tentang peran badan usaha milik desa Sukoraharjo dalam pengembangan usaha kerajinan tas anyaman guna mencapai tujuan yang diinginkan.

F. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, perlu dipaparkan penegasan istilah dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini mengenai “Peran Badan Usaha Milik Desa Sukoraharjo Dalam Pengembangan Usaha Kerajinan Tas Anyaman Desa Sukorejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.”

1. Definisi Konseptual

a. Peran

Peran adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Peran adalah terlaksananya hak dan kewajiban oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya.²⁶

b. BUMDes

BUMDes merupakan badan bisnis yang didirikan berdasarkan komitmen untuk berkerja sama dengan penduduk, bergotong royong, dan menggalang kemampuan ekonomi masyarakat guna membangun

²⁶ Pin Pin, *Peranan Keluarga Tjong Yang Him Terhadap Pembangunan Indonesia*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020), hal. 112

ketentraman dan kenyamanan warga desa. Fungsi BUMDes ada dua yaitu sebagai badan lembaga sosial yang menyediakan layanan sosial kepada masyarakat.²⁷ BUMDes sebagai badan lembaga komersil bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan Jasa) ke pasar dalam upaya peningkatan perekonomian desa.

c. Pengembangan usaha

Pengembangan usaha adalah suatu proses untuk memperbaiki strategi usaha atau melakukan perluasan usaha dimasa sekarang maupun dimasa mendatang.²⁸

d. Kerajinan tas anyaman

Kerajinan tas anyaman adalah salah satu kebudayaan yang dimiliki masyarakat sejak zaman dahulu yang berbahan baku dari bambu, rotan, dan panda. Seiring dengan perkembangan zaman bahan baku yang digunakan dalam pembuatan tas anyaman tidak hanya menggunakan bambu melainkan dapat menggunakan bahan baku plastik. Penggunaan bahan baku berupa plastik ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan.²⁹

²⁷ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa,....*, hal. 27

²⁸ Saryanto, *Produk Kreatif dan Kewirausahaan*, (t.t: Gramedia, 2021), hal.118

²⁹ Indah Noor Dwi Kusuma Dewi, Ira Aprilia, dan Linda Kurnia S, “Peningkatan Jumlah Produksi Kerajinan Anyaman Tas Dengan Alat Pemotong Dan Pengukur Tali Pengepak”, *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018, hal. 38

e. Desa Sukorejo

Desa sukorejo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karangrejo berada pada koordinat 111-112 bujur timur dan 7,5-8 linteng selatan berada diketinggian 90 meter.³⁰

f. Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

Kecamatan Karangrejo adalah kecamatan yang terdiri dari 13 desa salah satunya Desa Sukorejo yang terletak di lereng gunung wilis bagian timur dan berada dibarat laut kabupaten Tulungagung yang berjarak 15 Km dari kota.³¹ Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kediri sebelah utara, Kabupaten Blitar sebelah timur, Samudra Indonesia sebelah selatan, dan Kabupaten Trenggalek serta Kabupaten Ponorogo sebelah barat.³²

2. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa Sukoraharjo Dalam Pengembangan Usaha Kerajinan Tas Anyaman Desa Sukorejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ini, menjelaskan bagaimana peran BUMDes Sukoraharjo dalam pengembangan usaha

³⁰ Diakses dari <http://desasukorejo.tulungagungdaring.id>, Pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 12.27

³¹ Dari badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung,...

³² Diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung, pada tanggal 6 Maret 2021 pukul 11.25

kerajinan tas anyaman, bagaimana pendampingan BUMDes Sukoraharjo terhadap strategi pemasaran produk tas anyaman agar tetap laku terjual di pasaran serta bagaimana kontribusi BUMDes Sukoraharjo dalam perekonomian melalui tas anyaman sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa sukorejo.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penyusunan skripsi ini menggunakan pendoman Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung isi dari keseluruhan penelitian terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah penulisan skripsi ini penulis menguraikan sistematika penelitian yang terdiri dari 6 (enam) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Penulis menguraikan tentang latar belakang dari penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan. Pada bab ini peneliti menggambarkan tentang keadaan mengapa skripsi ini dibuat dengan diangkat judul tersebut.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan teori/materi yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: peran, bumdes, pengembangan usaha, strategi pemasaran, kerajinan tas anyaman, perekonomian, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang meliputi 8 sub bab: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAGIAN IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai paparan data dan hasil temuan penelitian. Paparan data tersebut oleh peneliti disajikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan dan wawancara. penelitian ini menekankan pada (1) Pengidentifikasian peran Badan Usaha Milik Desa Sukoraharjo dalam pengembangan usaha kerajinan tas anyaman. (2) Pengidentifikasian pendampingan BUMDes Sukoraharjo terhadap strategi pemasaran dalam pengembangan usaha kerajinan tas anyaman. (3) Pengidentifikasian kontribusi BUMDes Sukoraharjo bagi perekonomian melalui usaha kerajinan tas anyaman.

BAGIAN V PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang analisis dari hasil penelitian dan teori penelitian yang ada, dimana dalam bab ini akan melakukan pengelolaan data-data yang diperoleh saat melangsungkan penelitian dan menanggapi segala persoalan yang diambil oleh pengamat selaras dengan rumusan persoalan yang bersumber pada kenyataan, pendapat, dan tinjauan paham yang relevan. Kemudian data yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan di

BUMDes Sukoraharjo dianalisis sehingga nantinya menghasilkan data yang valid.

BAGIAN VI PENUTUP

Pada bab ini memuat mengenai kesimpulan dari hasil temuan penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah diselesaikan, serta dilengkapi daftar pustaka.